

BAB III

ANALISIS “SPILLOVER EFFECT” DARI KERJASAMA *EUROPEAN UNION-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT*

3. Pandangan Konsep “Spillover Effect” dalam Teori Neo Fungsionalisme

Dalam bab ini akan membahas tentang analisis dampak dari *European Union Ukraine Association Agreement* terhadap arah integrasi ekonomi serta politik antara Uni Eropa dengan Ukraina dengan konsep *spillover* yang masih berkaitan dengan teori integrasi yaitu Neo Fungsionalisme. Neo Fungsionalisme secara empiris menjelaskan proses perkembangan integrasi di kawasan Eropa, khususnya Uni Eropa. Neo Fungsionalisme menurut Ernst B Haas salah satu tokoh yang memaparkan teori Neo Fungsionalisme berasumsi bahwa proses integrasi terjadi secara kuasi otomatis karena banyaknya tuntutan dari negara-negara, hal tersebut dikarenakan banyaknya tuntutan kebutuhan untuk integrasi. Dengan demikian, kegiatan sektor-sektor yang sudah terintegrasi akan melimpahkan ke sektor-sektor yang belum terintegrasi, atau yang biasa disebut dengan “*spillover*” (Ernst B Haas, 1957, p. 13).

Menurut Schmitter, teori Neo Fungsionalisme merupakan sebuah teori yang menekankan kepada aktor non negara seperti organisasi internasional yang terlibat di dalam interaksi dan gerakan sosial di tingkat regional yang juga menyediakan dinamika integrasi lebih lanjut. Dalam teori Neo Fungsionalisme terdapat analisis bahwa telah terjadi kesepakatan kerjasama terlebih dahulu antara organisasi internasional akan tetapi kesepakatan tersebut tidak secara eksklusif

menentukan arah lebih lanjut dari kerjasama tersebut. Sedangkan peran organisasi internasional yaitu mengeksploitasi kerjasama tersebut sehingga menimbulkan “*spillover*” atau “efek limpahan” yang terduga maupun tidak terduga. Hal tersebut mampu membuat negara setuju untuk menerapkan beberapa regulasi berskala regional yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, dan teori tersebut memiliki skema bahwa ekonomi dan sosial integrasi akan tumpah menuju integrasi politik (Schmitter, 2002, p. 4).

Teori Neo Fungsionalisme menekankan keberhasilan proses integrasi pada konsep *spillover effect*. Menurut Nikola dan Ilievsky konsep *spillover effect* yaitu efek dari proses integrasi yang sedang berlangsung, dalam artian ketika sedang terjadi proses integrasi di sektor tertentu, maka secara spontan mengarah pada integrasi sektor lainnya (Nikola Lj. Ilievski, 2015, p. 5). Pendapat Jing Xu dan Shiong Shen menjelaskan bahwa terdapat 4 kunci di dalam teori Neo Fungsionalisme diantaranya yaitu konsep negara lebih fungsional dari pandangan yang diasarankan realis, yang kedua kegiatan kelompok kepentingan tidak sebatas politik domestik, yang ketiga ialah pentingnya aktor non negara dalam politik internasional, serta integrasi yang terjadi di Eropa salah satunya di sebabkan oleh kondisi *spillover*. Dalam jurnal tersebut juga menekankan bahwa *spillover* merupakan titik central dari teori Neo Fungsionalisme, di mana Neo Fungsionalisme didukung oleh 2 fase *spillover* yaitu *Functional Spillover* and *Political Spillover* (Jing Xu, 2014, pp. 217-18).

Functional Spillover dan *Political Spillover* menjadi asumsi kunci teori Neo fungsionalisme. Haas menjelaskan bahwa ekonomi industri modern saling berkesinambungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika negara-negara sudah

sudah mengalami integrasi di satu sektor maka secara langsung juga akan berdampak integrasi ke sektor lainnya. Hal tersebut terjadi karena terdapat penekanan-penekanan dan saling ketergantungan yang membuat hal tersebut disebut fungsional. Sebagai contoh Haas mencontohkan bentuk *functional spillover* dari sebuah kerjasama yaitu adanya perdagangan yang memiliki tarif menjadi non tarif atau penghilangan tarif (Haas, 1976, pp. 209-10). Sedangkan *Political Spillover* merupakan bentuk integrasi lebih lanjut dari integrasi ekonomi yang sudah terjadi. Dalam hal ini, *Political Spillover* dapat berbentuk integrasi politik dan aktor yang dominan dalam hal ini ialah aktor supranasional sedangkan aktor negara hanya menjalankan integrasi politik yang sedang terjadi. Aktor nasional lebih berfokus pada meningkatkan kegiatan ataupun integrasinya kedalam lingkup supranasional (Nugent, 2017, p. 448).

Membahas tentang Neo Fungsionalisme dan konsep integrasi, Uni Eropa menjadi model integrasi di dunia, integrasi di Eropa selalu menampilkan fase yang terstruktur dan juga memiliki tahapan-tahapan yang paling maju di dunia. Indikator kemajuan, dilihat dari interaksi di Eropa yang mencakup institusi/organisasi supranasional maupun entitas ekonomi di dalamnya. Ana Vizjak menjelaskan bahwa awal mula terbentuknya integrasi bisa dilihat dengan sudut pandang ekonomi internasional, menurutnya bentuk integrasi yang paling sederhana yaitu aktivitas perdagangan, monopoli produksi serta perusahaan dalam ruang lingkup yang menggabungkan dua atau lebih entitas ekonomi nasional. Ana Vizjak juga menjelaskan bahwa integrasi sudah mengalami tingkat perbedaan di abad 19 dan 20. Di abad 19 integrasi ekonomi masih sebatas aktivitas ekonomi yang menghilangkan hambatan perdagangan, sedangkan untuk abad 20, integrasi

lebih berusaha menciptakan sebuah kondisi baru seperti pasar bebas serta menciptakan asosiasi politik. Dalam melihat metode integrasi, menurutnya pasar adalah integrator utama serta kelembagaan ataupun institusi /organisasi supranasional. Selain itu, integrasi akan sangat bergantung pada bagian yang secara signifikan memberikan efek positif dalam perkembangannya (Vizjak, 2014, pp. 1159-63).

Berbeda dengan Ana Vizjak, Sweet dan Sandholtz melihat bahwa integrasi Uni Eropa dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pertukaran transnasional, organisasi supranasional serta pembuatan aturan oleh *European Community*. Pertukaran transnasional menjadi hal yang paling signifikan dalam menjalankan proses integrasi. Sweet dan Sandholtz mencontohkan pertukaran transnasional seperti perdagangan, komunitas-komunitas, serta asosiasi dan sebagainya. Dari beberapa contoh tersebut membuat organisasi supranasional seperti Uni Eropa membuat kebijakan baru yang menyelaraskan dengan beberapa bentuk pertukaran transnasional tersebut, sehingga menghasilkan kebijakan baru untuk mengatur serta menciptakan sebuah integrasi. Ketika integrasi sudah terbentuk, maka kemajuan integrasi dapat diprediksi serta organisasi supranasional dapat mengembangkan integrasinya ke sektor-sektor lainnya. Salah satu argumennya, menekankan bahwa fungsi organisasi supranasional lebih kepada melayani aktor-aktor seperti kelompok pemerintah atau perusahaan yang bertransaksi lintas negara. Dengan demikian maka organisasi supranasioal dapat memperluas tentang domain-domain aturan supranasionalnya (Sweet & Sandholtz, 1997, pp. 298-99).

3.1 Integrasi Ekonomi (*Functional/Economic Spillover European Union-Ukraine Association Agreement*)

Dalam poin analisis tentang kasus *European Union-Ukraine Association Agreement*, jika melihat dengan kerangka teori Neo fungsionalisme bahwa asumsi yang pertama dari teori tersebut adalah *Functional/Economic Spillover*. *Functional Spillover* merupakan kemunculan masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh integrasi dan hanya dapat diselseikan oleh integrasi yang lebih lanjut di sektor yang masih berkaitan satu sama lain. Salah satu contohnya yaitu ketika awal terbentuknya ECSC (*European Coal and Steel Community*), di mana dari bentuk kerjasama tersebut menimbulkan *spillover* ke sektor yang masih berkaitan diantaranya terbentuknya pasar bebas, pasar energi serta mata uang tunggal (Marko, 2017, pp. 317-18).

Pasca penerapan *Association Agreement* dan *Deep Comprehensive Free Trade Area*, Ukraina memang mendapatkan beberapa dampak yang signifikan dari kerjasama tersebut. Melihat dari bab sebelumnya, bahwa dampak yang diperoleh Ukraina untuk sektor ekonomi khususnya ialah peningkatan volume perekonomiannya untuk sektor industri. Selain di sektor industri, sektor energi juga menjadi salah satu sektor yang dibahas di dalam *Association Agreement* dan *Deep Comprehensive Free Trade Area*. Dari 2 sektor tersebut, sudah memperlihatkan dampak yang terjadi di Ukraina di mana untuk sektor industri dalam konteks perdagangan dengan Uni Eropa maka pengurangan tarif menjadi dampak awal dari kerjasama tersebut, sedangkan untuk dampak awal sektor energi yaitu munculnya kebijakan-kebijakan di sektor energi yang berorientasi secara struktural dengan Uni Eropa.

Dari beberapa hasil awal yang di atas bahwa sesuai dengan teori Neofungsionalisme dengan konsep spillover, yaitu *functional spillover*, *Association Agreement* dan *Deep Comprehensive Free Trade Area* menimbulkan *functional spillover* ke arah integrasi yang lebih dalam. Argumen dari penelitian ini, dilihat dari bentuk *functional spillover* dari *Association Agreement* dan *Deep Comprehensive Free Trade Area* yaitu proses atau fase di mana Ukraina menyesuaikan terhadap pasar internal Uni Eropa atau menuju *Custom Union*. Hal tersebut didasarkan bahwa *functional spillover* terjadi ketika adanya penghilangan tarif di dalam kerjasama *Association Agreement* dan *Deep Comprehensive Free Trade Area*, dan dari penghilangan tarif tersebut Uni Eropa serta Ukraina membentuk potensial prospek tentang tarif perdagangan baru di dalam *Custom Union*. Hal tersebut dikatakan sebagai *functional spillover* dikarenakan, penghapusan tarif yang terjadi dan pembentukan kesepakatan tarif baru mengakibatkan tekanan positif bagi pemerintah Ukraina sehingga pemerintah Ukraina mulai sedikit demi sedikit mulai menyerahkan kendali atas regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sehingga Ukraina mulai menyesuaikan tarif baru dengan Uni Eropa. (Jing Xu, 2014, p. 217).

Jika dilihat dengan bagan, arah *functional/economic spillover* dari kerjasama *European Union-Ukraine Association Agreement* mengarah ke kerjasama lainnya. Kerjasama tersebut tentunya berupa integrasi ekonomi yang lebih dalam, jika dilihat dengan sebuah bagan, analisis penelitian ini mencoba menggambarkan arah integrasi ekonomi yang lebih dalam dari *Association Agreement* yaitu *Custom Union*.

Bagan 1: Bagan *Functional/Economic Spillover* dari *European Union-Ukraine Association Agreement*



Source : Emerging Europe <https://emerging-europe.com/news/eu-may-offer-georgia-moldova-and-ukraine-customs-union-and-schengen-access/>

3.1.1 Ukraina menuju *Custom Union* Uni Eropa

Dalam sub bab ini mencoba menjabarkan bagaimana Ukraina menuju *Custom Union* Uni Eropa. Hal tersebut didasarkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk *Functional Spillover/Economic Spillover* dari *European Union-Ukraine Association Agreement* dan *Deep Comprehensive free Trade Area*. Sesuai dengan konsep *Functional Spillover* yaitu ketika terjadi integrasi ekonomi dan melimpah ke sektor lainnya ataupun tuntutan untuk integrasi lebih dalam. Sesuai dengan asumsi teori tersebut juga terjadi hal yang di dalam studi kasus *European Union-Ukraine Association Agreement* ketika integrasi awal yaitu *Association Agreement* yang sifatnya masih perdagangan bebas untuk sektor ekonominya kemudian terjadi tuntutan integrasi lebih dalam untuk proses tersebut

yaitu Ukraina terdapat keinginan mengakses pasar Uni Eropa atau menuju *Custom Union*. Adapun bentuk integrasi yang dimaksud adalah bagaimana langkah Uni Eropa Ukraina dalam proses penyesuaian terhadap *Custom Union* dengan indikator tarif.

Di dalam sebuah perdebatan tentang dampak kerjasama jangka panjang tentang *Association Agreement* terdapat 4 alternatif prospek dari kerjasama tersebut. Prospek yang pertama adalah bahwa *Association Agreement/Deep Comprehensive Free Trade Area* akan beralih kepada kerjasama keamanan dan kebijakan luar negeri bersama. Prospek kedua, bahwa *Association Agreement dan Deep Comprehensive Free Trade Area* akan beralih menuju *European Economic Area* dikarenakan *European Economic Area* memiliki kemiripan dalam hal regulasi dengan *Association Agreement*. Prospek ketiga adalah bergabung dengan *Custom Union* Uni Eropa, hal tersebut memang sedang diusulkan oleh presiden Ukraina. Jika benar *Custom Union* menjadi langkah selanjutnya dari kerjasama *Association Agreement/Deep Comprehensive Free Trade Area* maka akan menimbulkan konsekuensi ekonomi serta politik yang cukup rumit bagi Ukraina. Prospek ke empat yaitu bergabungnya Ukraina dengan FTA dilingkungan tetangga Uni Eropa seperti *Pan Euro Mediteranian*, EFTA dan lainnya. Dari keempat hipotesis tersebut, salah satu hipotesis yang cukup memiliki aspek potensial terbentuk yaitu bergabungnya Ukraina dengan *Custom Union* Uni Eropa.

Pembahasan tentang bergabungnya Ukraina menuju *Custom Union* juga dibahas di *EU-Ukraine Parliamentary Association Committee Seventh Meeting* 18-19 April 2018 tentang *Final Statement and Recommendations Pursuant to*

Article 467(3) of the Association Agreement menghasilkan beberapa rekomendasi untuk integrasi ekonomi salah satunya yaitu

Believes that the EU should device an “Eastern partnership plus” model in line with the EP resolution on the Eastern Partnership (EaP) of 15 November 2017, including the creation of a dedicated support mechanism for EaP countries committed to implementing the AAs welcomes the establishment of the Euronest PA ad hoc working group on Association Agreements and calls for similar formats to be established in areas others than the interparliamentary cooperation; believes that, while the focus of bilateral relations should be placed on AA implementation, a thorough reflection should take place on areas in which the EU-Ukraine cooperation could benefit from further developments, beyond what is foreseen in the existing agreements; supports in this connection Ukraine’s aspirations of joining the European Energy Union, Digital Single Market, Customs Union and being associated with the Schengen area, as well as further internal market access and deeper integration with EU transport networks, provided that the benefits of such projects for Ukraine are demonstrated, and in accordance with fulfilment of conditionality, notably in the area of rule of law and fight against corruption; looks forward to the results of the feasibility studies currently conducted by EU Commission on the four areas (EU-Ukraine Parliamentary Association Committee, 2018).

Untuk regulasi secara resmi, memang dari masing-masing aktor membutuhkan mekanisme baru untuk pembaharuan kesepakatan mengingat *Association Agreement* dan *Custom Union* merupakan 2 bentuk kerjasama yang berbeda. Dalam tabel di bawah terdapat perbedaan tahapan integrasi, di antaranya adalah ditabel berikut :

Tabel 3 : Perbedaan Tahapan Integrasi

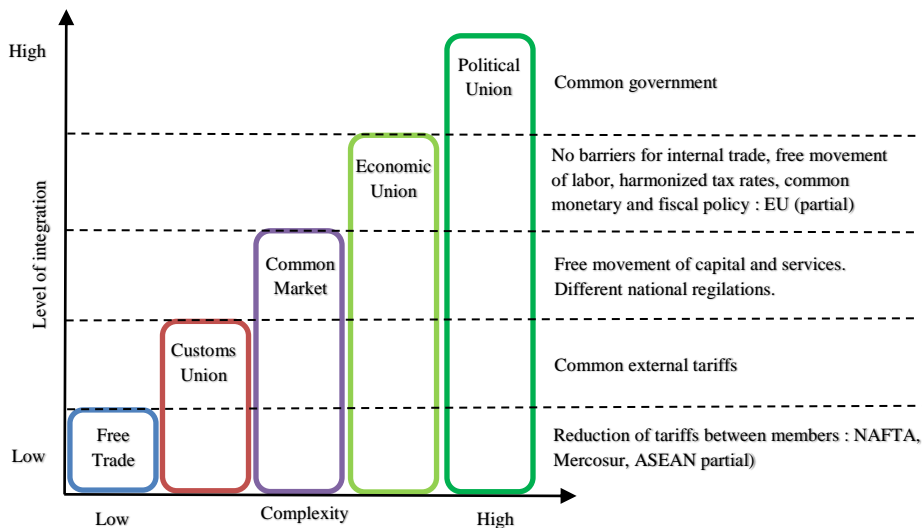
Perbedaan Tahapan Integrasi Ekonomi	Tidak ada Hambatan Perdagangan Internal	Tarif Umum Eksternal	Faktor dan Mobilitas Aset	Mata Uang Bersama	Kebijakan Ekonomi Umum
Perdagangan Bebas	√				
Custom Union	√	√			
Pasar Tunggal	√	√	√		
Serikat Moneter	√	√	√	√	
Serikat Ekonomi	√	√	√	√	√

Source : <https://www.tutor2u.net/economics/reference/customs-unions-and-single-markets>

Dengan melihat tabel di atas, penekanan tentang arah integrasi Ukraina jika menuju arah *Custom Union* maka akan berpengaruh kepada *Common External Tariff* (Movchan M. E., 2017, pp. 2-5). Prospek bergabung ke *Custom Union* memang memiliki resiko besar untuk sektor perdagangannya, khususnya masalah tarif. Bergabungnya tersebut juga dikarenakan reformasi yang ditunjukkan oleh Ukraina menunjukkan peningkatan yang signifikan. *Custom Union* adalah bentuk insentif yang kuat bagi hubungan Uni Eropa dengan Ukraina untuk melanjutkan prospek integrasi jangka panjang mereka (Tumwebaze, 2017).

Analisis kemungkinan bergabungnya Ukraina dengan *Custom Union* jika dilihat dengan grafik level integrasi, terjadi peningkatan ke tahap selanjutnya

Grafik 1: Grafik Level Integrasi



Source : https://transportgeography.org/?page_id=4082

Custom Union merupakan bentuk tingkat lanjutan dari sebuah kerjasama perdagangan atau *Free Trade*. Dalam hal ini, bergabungnya Ukraina menuju

Custom Union tujuan realistis dari *Deep Comprehensive Free Trade Area*. Terdapat sebuah hipotesis bergabungnya Ukraina dengan *Custom Union* akan terjadi pada periode transisi 7-10 penerapan *Deep Comprehensive Free Trade Area*. Hipotesis tersebut didasarkan pada bagaimana bentuk kepentingan perdagangan Ukraina secara global serta proses perbaikan yang dilakukan oleh Ukraina di sektor bea cukai secara komperhensif (Michael Emerson, 2016).

Relasi dari *Association Agreement* dan *Deep Comprehensive Free Trade Area* menuju *Custom Union* yaitu *Custom Union* melebihi interaksi perdagangan yang terjadi di dalam *Deep Comprehensive Free Trade Area*, jika di dalam *Deep Comprehensive Free Trade Area* menghilangkan tarif perdagangan antar kedua aktor, di dalam *Custom Union* menetapkan tarif eksternal umum yang telah disepakati bersama dan diterapkan kepada negara non anggota *Custom Union*. Proses penetapan tarif bersama tersebut menjadi indikator dalam *functional spillover*.

Dengan *Custom Union*, Anders Fogh Rasmussen menjelaskan bahwa *Custom Union* dijadikan faktor pendorong hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina untuk mekanisme tambahan agar penerapan *Deep Comprehensive FreeTrade Area* dapat berjalan maksimal dan membantu integrasi jangka panjang kedua aktor tersebut. Adanya tarif eksternal dalam *Custom Union* merupakan sebuah tarif maksimum yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk impor perdagangannya di bawah peraturan WTO. Kondisi tarif eksternal antara Uni Eropa dan Ukraina terjadi perbedaan, maka dari itu Ukraina harus mengubah tarif eksternalnya untuk menyesuaikan dengan tarif eksternal yang diterapkan Uni Eropa. Beberapa langkah untuk terwujudnya *functional spillover* sesuai dengan

tarif yang dijadikan indikator, maka Uni Eropa dapat membuat Ukraina dapat menyesuaikan tarifnya diantaranya menilai dari “*Ad Valorem*” (AV) dan “*Non Ad Valorem*” (NAV), dalam hal ini Uni Eropa dapat menerapkan secara sementara kepada Ukraina tentang “*Ad Valorem*” (AV), selain itu Uni Eropa juga dapat memperkenalkan “*Non Ad Valorem*” kepada sektor-sektor pertanian. Langkah yang kedua, dengan membandingkan perbedaan rata-rata tarif masuk Uni Eropa Ukraina yang terikat dengan “*Ad Valorem*”, dengan metode mengurangi tingkat rata-rata barang yang sama. Statistik memang menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki tarif eksternal lebih tinggi dibandingkan dengan Ukraina, sehingga Ukraina harus menaikkan “*tariff binding*” di WTO agar sejajar dengan Uni Eropa (European Parliament, 2017, pp. 5-7).

Tabel 4 : Rata-Rata Tarif Bea Masuk antara Ukraina dengan Uni Eropa (%) 2016

	Ukraina	Uni Eropa
Produk Agrikultur	9,2 %	11,1 %
Produk Industrial	3,7 %	4,2 %
Total, Produk, Rata-Rata	4,5 %	5,2 %

Source:<http://www.3dcftas.eu/system/tdf/Ukr%20customs%20union%20final.pdf?file=1&type=node&id=373>

Dalam bab selanjutnya, analisis selanjutnya adalah tentang integrasi politik yang terjadi sebagai *political spillover* dari kerjasama *Association Agreement/Deep Comprehensive Free Trade Area*. Arah analisis dari integrasi menuju integrasi politik merupakan bentuk alur integrasi menurut asumsi teori Neo Fungsionalisme.

3.2 Integrasi Politik (*Political Spillover European Union-Ukraine Association Agreement*)

Perkembangan integrasi politik Uni Eropa berawal dari integrasi pasar di sektor tertentu seperti batu bara, pertanian, manufaktur dan energi serta kebijakan ekonomi lainnya yang menimbulkan *spillover* atau efek limpahan di sektor tertentu yang membutuhkan integrasi politik yang penuh untuk menyempurnakan hal tersebut. Proses yang biasanya terjadi dalam integrasi politik Uni Eropa dapat dilihat ketika integrasi pasar yang menjadi dasar fase integrasi politik memainkan peran penting dengan memberikan keuntungan terhadap pemerintah nasional (pemerintah negara) melalui pajak ataupun sumber daya sehingga untuk mempertahankan posisi tersebut pemerintah nasional sering melakukan kebijakan sentralisasi sesuai dengan standar Uni Eropa.

Dalam menganalisis bab ini, menggunakan salah satu bentuk asumsi dari Neo fungsionalisme yaitu *Political Spillover*. *Political Spillover* seperti yang sudah dijelaskan dibagian penerapan teori merupakan kondisi dari dampak integrasi ekonomi, di mana terjadi perubahan perhatian, di mana pemerintah negara lebih mengalihkan perhatiannya di tingkat supranasional. Hal tersebut terjadi karena ada proses untuk mencapai kepentingan bersama. Hal yang menjadi indikator *political spillover* ialah aktor supranasional lebih memiliki peran dan pengaruh terhadap proses integrasi. Proses integrasi tersebut menghasilkan tuntutan untuk kontrol politik terhadap pemerintah negara (Nugent, 2017, p. 448).

Jika melihat penjabaran sekilas tentang *political spillover*, arah *political spillover* dari *European Union-Ukraine Association Agreement* terdapat 2 argumen

utama. Argumen yang pertama adalah keterlibatan Uni Eropa dalam perkembangan demokrasi di Ukraina, sedangkan poin yang kedua yaitu proses Ukraina menuju nilai-nilai Uni Eropa atau dapat dikatakan Ukraina menuju *Copenhagen Criteria*. Poin yang pertama tentang keterlibatan Uni Eropa dalam perkembangan demokrasi di Ukraina merupakan *political spillover* karena aktor supranasional (Uni Eropa) memiliki peran penting dalam proses integrasi. Uni Eropa secara empiris terbukti terlibat dalam perkembangan demokrasi Ukraina, hasilnya adalah Ukraina dalam pembentukan dan pembangunan demokrasinya mengikuti dan menyesuaikan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai Uni Eropa, kemudian peran aktor negara juga mulai berkurang sehingga orientasi kebijakan yang bangun lebih mengarah ke Uni Eropa.

Argumen kedua tentang *political spillover* dari *European Union-Ukraine Association Agreement* adalah proses Ukraina menuju nilai-nilai Eropa atau *Copenhagen Criteria*. Argumen dalam penelitian ini menganalisis bahwa Uni Eropa menjadikan *Copenhagen Criteria* sebagai standar dalam mempromosikan nilai-nilai Uni Eropa. Hal tersebut dikatakan sebagai *political spillover* karena dalam hal ini, Uni Eropa terlibat langsung dalam mempromosikan nilai-nilai tersebut, sehingga sebagai aktor supranasional Uni Eropa memiliki peran yang terlihat dibandingkan peran aktor negara, pemerintah negara Ukraina hanya akan mengikuti dan menjalankan proses integrasi lebih lanjut tersebut. Hasilnya aktor supranasional memiliki penegasan dalam keberlangsungan proses integrasi serta memiliki kontrol atas sektor yang sedang mengalami proses integrasi lanjut.

Bagan 2 : Skema *Policial Spillover* dari *European Union-Ukraine Association Agreement*.



Source : Telegraph News : <https://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/24/ukraine-climbing-towards-true-democracy-need-wests-help/>, Politico : <https://www.politico.eu/article/copenhagen-lite-criteria-would-offer-incentive-for-ukraine-reform/>,

3.2.1 Keterlibatan Uni Eropa dalam Perkembangan Demokrasi di Ukraina

Keterlibatan Uni Eropa di dalam perkembangan demokrasi bila didefinisikan yaitu proses semua kegiatan langsung tanpa kekerasan yang bertujuan memperkuat serta meobilisasi perkembangan demokrasi dinegara ketiga. Keterlibatan di Ukraina memang sudah menjadi fenomena yang cukup sering dilihat, mengingat Uni Eropa menjadi salah satu penggagas nilai-nilai demokrasi. Keberhasilan Uni Eropa dalam mempromosikan demokrasinya memang biasanya dikaitkan dengan keanggotaan. Untuk saat ini, femomena

penerapan kebijakan asosiasi yang di dalamnya terdapat unsur keanggotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara seperti Ukraina, Moldova, Georgia dll. Uni Eropa menjadikan kerjasama yang berbentuk asosiasi maupun mitra menjadi sarana untuk mempromosikan demokrasi. Tujuan Uni Eropa mempromosikan dan memulai keterlibatannya yaitu untuk menghasilkan reformasi kelembagaan kepada negara target. Dalam hal itu, Uni Eropa melakukan kondisionalitas dengan menetapkan adopsi lembaga dan praktik demokrasi yang harus dipenuhi oleh negara target. Sebagai imbalan, Uni Eropa memberikan akses kerjasama dalam berbagai bentuk seperti perjanjian asosisasi, perjanjian dagang ataupun keanggotaan (Lavanex, Schimmelfening, 2011, pp. 887-893).

Sebelum terbentuknya perjanjian-perjanjian seperti *Association Agreement* ataupun *Eastern Partnership*, Solonenko melihat bahwa keterlibatan Uni Eropa dalam demokrasi di Ukraina masih sangatlah terbatas dengan kesepakatan-kesepakatan yang lama serta perkembangan terakhir dari negara tersebut. Walaupun Ukraina telah mengalami revolusi oranye pada 2004-2005, Uni Eropa belum mengubah kebijakan ke Ukraina menjadi lebih intensif ataupun sebuah prospek keanggotaan yang mampu mengkonsolidasi perubahan demokrasi yang lebih maju. Menurut Solonenko, dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina masih terlalu kecil, di mana demokratisasi menjadi elemen utama Europeanisasi belum berjalan optimal sehingga membuat dukungan Uni Eropa terhadap perkembangan demokrasi di Ukraina berdampak kurang signifikan (Solonenko, 2009, p. 711).

Setelah adanya *Association Agreement*, keterlibatan Uni Eropa dalam perkembangan demokrasi di Ukraina semakin kompleks. Argumen tentang arah *Political Spillover* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu fase di mana Uni

Eropa pada awal keterlibatannya hanya sebatas mempromosikan nilai-nilai demokrasi saja, namun setelah adanya *Association Agreement*, keterlibatan Uni Eropa semakin signifikan, dari yang awalnya hanya mempromosikan demokrasi kemudian berkembang menjadi dukungan reformasi serta implementasi kebijakan dan juga stabilisasi demokrasi untuk pemerintah Ukraina. Hal tersebut, dibuktikan dengan Uni Eropa mendukung Ukraina dalam pendirian lembaga-lembaga demokratis seperti administrasi negara, peradilan, pembangunan daerah dan pedesaan, Uni Eropa juga memberikan bantuan finansial untuk reformasi di sektor tersebut sebesar € 11,175 miliar. Bantuan juga akan ditambah lagi jika pemerintahan Ukraina menunjukkan kemauan melakukan reformasi struktural untuk lebih banyak lagi prinsip yang dijalankan Ukraina (Kikwitzki, 2015, p. 24). Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat dengan 2 indikator *political spillover*, keterlibatan Uni Eropa terlihat lebih dominan karena memberikan arahan lebih terhadap perkembangan demokrasi di Ukraina, sedangkan Ukraina sendiri mengikuti nilai-nilai serta regulasi yang ada di Uni Eropa dalam perkembangan demokrasi atau bisa disimpulkan bahwa proses perkembangan demokrasi di Ukraina berkiblat pada Uni Eropa.

Secara regulasi, keterlibatan Uni Eropa di dalam perkembangan demokrasi Ukraina juga menjadi bagian di dalam *Association Agreement*. Beberapa bagian di dalam perjanjian tersebut menjelaskan keterlibatan serta dukungan terhadap demokrasi di Ukraina. Keterlibatan Uni Eropa di dalam demokrasi terdapat di dalam tujuan awal perjanjian ini

To promote gradual rapprochement between the Parties based on common values and close and privileged links, and increasing Ukraine's association with EU policies and participation in programmes and agencies

Keterlibatan Uni Eropa di dalam perkembangan demokrasi Ukraina tidak hanya dibahas di dalam tujuan umum perjanjian tersebut, akan tetapi juga menjadi salah satu poin di dalam Title 3 tentang *Political Dialogue and Reform, Political Association, Cooperation and Convergence in the Field of Foreign and Security Policy*. Salah satu bagian yang membahas keterlibatan terdapat dibagian tujuan *Political Dialogue*. Isi kesepakatan tersebut berisi tentang

To strengthen respect for democratic principles, the rule of law and good governance, human rights and fundamental freedoms, including the rights of persons belonging to national minorities, non-discrimination of persons belonging to minorities and respect for diversity, and to contribute to consolidating domestic political reforms (Association Agreement, 2014).

Bentuk keterlibatan Uni Eropa dalam perkembangan demokrasi di Ukraina menghasilkan beberapa kebijakan reformasi dari pemerintah Ukraina. Beberapa kebijakan demokratis sudah diterapkan oleh pemerintah Ukraina. Laporan tentang reformasi Ukraina pada tahun 2016 sudah berjalan cukup optimal, beberapa diantaranya yaitu peluncuran "*decoration platform*", "*law enforcement reform*" serta desentralisasi. Dari kebijakan tersebut, masing-masing bagian kebijakan disertai pembentukan biro maupun badan yang bertugas di bawah payung hukum regulasi regulasi tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan dibentuknya badan anti korupsi Ukraina yang sudah mulai bertugas di bawah kebijakan "*decoration platform*" (NN, 2017).

Kekuatan utama demokrasi di Ukraina yaitu adalah masyarakat sipilnya, dukungan-dukungan terhadap pemerintah untuk semakin dekat dengan Uni Eropa menjadikan poin lebih bagi pemerintah Ukraina. Di dalam sebuah index tentang penilaian demokrasi di Ukraina, Ukraina masih mengalami fluktuatif dalam perkembangan demokrasinya.

Tabel 5: Indeks demokrasi Negara Ukraina dalam Peringkat Transit dan Skor Rata-rata

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pemerintahan Demokratik Nasional	4,75	4,75	5,00	5,00	5,50	5,75	5,75	6,00	6,00	5,75
Proses Pemilihan	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,75	4,00	4,00	3,50	3,50
Masyarakat Sipil	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,50	2,25	2,25
Independensi Media	3,75	3,50	3,50	3,50	3,75	4,00	4,00	4,25	4,00	4,00
Pemerintah Demokratik Lokal	5,25	5,25	5,25	5,25	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,25
Kerangka Peradilan dan Independensi	4,50	4,75	5,00	5,00	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Korupsi	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	6,00	6,00	6,25	6,00	6,00
Nilai Demokrasi	4,25	4,25	4,39	4,39	4,61	4,82	4,86	4,93	4,75	4,68

Source: Freedom House <https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine>

Indeks demokrasi tersebut menghitung dengan skala 1-7, dengan 1 menjadi skor tertinggi dan 7 dengan skor terendah. Dengan grafik tersebut, memaparkan bahwa Ukraina mengalami peningkatan demokrasi yang cukup fluktuatif dari tahun 2007-2016, naik turunnya indeks demokrasi Ukraina disebabkan oleh beberapa faktor pada tahun-tahun tersebut. Di antaranya yaitu agresi militer di krimea dan gerakan Euromaidan. Setelah penandatanganan *Association Agreement* pada 2014, indeks demokrasi Ukraina mengalami peningkatan khususnya pada bagian Pemerintahan Demokratik Nasional. Hal tersebut diakibatkan mulai aktifnya kembali lembaga-lembaga penunjang demokrasi dan mulai stabilnya pemerintahan tersebut. Pemerintahan daerah juga mengalami peningkatan demokrasi karena menerapkan beberapa undang-undang baru untuk penerapan pemerintahan yang lebih demokratis. Hasilnya demokrasi

Ukraina mengalami peningkatan dari 4,93 menjadi 4,75 dan menjadi 4,68 pada tahun 2016 (Freedom House, 2016).

Hal penting keterlibatan Uni Eropa dalam demokrasi di Ukraina adalah bahwa semakin beragamnya kerjasama suatu negara, maka akan semakin besar juga peluang mereka akan berkontribusi pada pembentukan rezim yang lebih terbuka. Keterlibatan diruang lingkup politik domestik suatu negara, dampak yang akan terlihat tentunya akan semakin membuka pemerintahan tersebut semakin demokratis (Sasse, 2012, p. 554). Keterlibatan Uni Eropa dalam integrasi serta perkembangan demokrasi biasanya berdampak jangka panjang, dan dampak tersebut dapat bersifat gradual untuk prospek keanggotaan sebuah negara. Untuk prospek keanggotaan, Whitehead menjelaskan bahwa pembentukan lembaga-lembaga demokratis akan menghasilkan basis yang kuat karena lembaga tersebut tidak dapat diubah, selain itu integrasi politik yang sedang dibangun menawarkan penegasan kepada berbagai lembaga maupun elemen sosial disebuah negara (Whitehead, 1997, p. 19).

Bagi Ukraina, dampak yang paling diinginkan dari bentuk integrasi politik tersebut tentunya prospek keanggotaan Uni Eropa. Bagi Ukraina, keanggotaan Uni Eropa merupakan tujuan strategis jangka panjangnya, dalam hal ini prospek keanggotaan Ukraina tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini, akan tetapi pasti akan terjadi. Selain itu, bagi Ukraina keterlibatan Uni Eropa dalam demokrasi dan dukungan reformasi dari kerjasama *Association Agreement* akan merubah Ukraina menjadi lebih dekat dengan *Copenhagen Criteria* (NN, Poroshenko: Ukraine's membership in EU and NATO not viable in 2018, but will happen eventually, n.d.).

Di bab selanjutnya, penulis mencoba membahas integrasi politik lainnya yang merupakan *political spillover* dari kerjasama *Ukraine-European Union Association Agreement*. Dalam bab selanjutnya, bab yang akan dibahas adalah bukti bahwa *political spillover* dari kerjasama tersebut mengarah pada penyesuaian terhadap *Copenhagen Criteria*.

3.2.2 Ukraina menuju *Copenhagen Criteria*

Membahas mengenai arah integrasi Uni Eropa di kawasan Eropa Timur, penulis mencoba mengkaitkan hubungan Uni Eropa dengan Ukraina melalui kerjasama *Association Agreement* menuju penguatan kandidat keanggotaan dengan indikator proses menuju *Copenhagen Criteria*. Selain itu, penulis mencoba meyakinkan bahwa Ukraina menuju *Copenhagen Criteria* merupakan *political spillover* dari kerjasama *Association Agreement*. Walaupun secara resmi Ukraina belum menjadi negara kandidat keanggotaan Uni Eropa ataupun penyesuaian terhadap *Copenhagen Criteria*, akan tetapi penulis mencoba membuktikan bahwa arah integrasi yang dibangun oleh Uni Eropa dan Ukraina menuju ke arah tersebut.

Sebelum menuju negara kandidat anggota Uni Eropa, setiap negara wajib menyesuaikan persyaratan keanggotaan dengan menyesuaikan terhadap *Copenhagen Criteria*. *Copenhagen Criteria* merupakan perjanjian antara negara-negara anggota Uni Eropa yang dibuat pada tahun 1993 di mana setiap negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa wajib menyesuaikan diri dengan kriteria yang ditulis dalam perjanjian tersebut. Adapun kriterainya untuk akses menuju keanggotaan Uni Eropa yaitu :

1. *Stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities;*
2. *A functioning market economy and the ability to cope with competitive pressure and market forces within the EU;*
3. *Ability to take on the obligations of membership, including the capacity to effectively implement the rules, standards and policies that make up the body of EU law (the 'acquis'), and adherence to the aims of political, economic and monetary union (Eur-Lex, n.d.).*

Secara nilai-nilai yang tertera di dalam *Copenhagen Criteria* tentang 3 pilar tersebut, secara nilai-nilai yang terkandung di dalam *Copenhagen Criteria* hampir sama dengan yang terangkum di dalam perjanjian *Association Agreement*. Hal tersebut dibuktikan dengan penekanan dalam kerjasama *Association Agreement*, di mana dalam prinsip dan nilai-nilai dalam kerjasama tersebut yaitu penguatan nilai-nilai demokrasi, penegakan supremasi hukum, penghormatan kepada hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan untuk pemerintahan yang baik. Sedangkan untuk sektor ekonomi tentunya prinsip umumnya sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Uni Eropa yaitu pembangunan ekonomi pasar yang berkelanjutan, penyesuaian pasar dengan standar Uni Eropa. Selain itu, sektor lainnya yaitu energi, kerjasama keamanan bersama serta kerjasama dalam 28 sektor. Setiap bagian dari kerjasama, terdapat proses untuk penyesuaian standar Uni Eropa dari segi regulasi maupun prosesnya (Ukraine, 2016)

Poin-poin yang terdapat di dalam *Copenhagen Criteria* adalah penegakan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia serta kelembagaan yang bersih. Untuk poin kedua ekonomi yaitu kekuatan pasar yang mampu bersinergi dengan pasar internal Uni Eropa, sedangkan poin selanjutnya yaitu kemampuan untuk menerapkan kebijakan ataupun aturan Uni Eropa dan patuh terhadap tujuan politik Uni Eropa serta tujuan ekonomi moneter Uni Eropa. Dari ketiga poin tersebut,

bahwa poin pertama dan kedua di dalam *Copenhagen Criteria* terdapat pada kesepakatan *Association Agreement*. Hal tersebut dibuktikan dengan perbaikan demokrasi serta lembaga Ukraina di bawah *Association Agreement*, sedangkan untuk ekonomi yaitu fase di mana Ukraina mulai dapat mengakses pasar Uni Eropa. Hal tersebut, jika dianalisis bahwa Ukraina sudah memiliki 2 nilai dari *Copenhagen Criteria*.

Untuk aspek yang lain yaitu keanggotaan, Uni Eropa menyediakan mekanisme bagi negara-negara yang ingin mendapatkan aspirasi Uni Eropa. Uni Eropa semakin memperkuat kapasitas integrasinya di kawasan Eropa Timur dengan menyediakan metode kerjasama yang dapat berfungsi untuk negara di kawasan Eropa Timur membuat kebijakan serta institusi yang selaras dengan nilai-nilai Uni Eropa. Langkah awal menggunakan metode integrasi ekonomi yang bertujuan mendorong keberlanjutan menuju pasar Uni Eropa. Kemudian dilanjutkan dengan integrasi politik yang mempromosikan demokrasi kepada negara anggota maupun non anggota. Dalam hal ini, keanggotaan Uni Eropa adalah faktor utama yang mempengaruhi negara-negara di kawasan Eropa Timur untuk menjalankan integrasi dengan metode kerjasama seperti *European Neighbourhood Policy* (ENP) dan *Eastern Partnership* (EaP). Bagi negara-negara yang tergabung di dalam kerjasama tersebut, Uni Eropa tidak memberikan kapasitas keanggotaan secara langsung, akan tetapi Uni Eropa melihat bagaimana negara-negara tersebut dalam mereformasi ekonomi serta politiknya yang selaras dengan Uni Eropa. Namun, Uni Eropa juga menyediakan 2 instrumen yang memberikan jalan kepada negara untuk menjadi keanggotaan yaitu “*reinforcement by reward*” (positive conditionality) dan “*reinforcement by support*” (capacity-building). Dalam kasus

European Neighbourhood Policy (ENP), Uni Eropa tidak memberikan instrument “*reinforcement by reward*” karena masih kurang signifikannya penerapan demokrasi di negara anggota ENP. Sebagai konsekuensinya, Uni Eropa menciptakan kerangka kerjasama yang lebih intensif guna melihat bagaimana perubahan yang telah dicapai negara-negara tersebut, dan salah satu bentuknya yaitu *Association Agreement* serta *Deep Comprehensive Free Trade Area*. Dengan kata lain bahwa *Association Agreement* dan *Deep Comprehensive Free Trade Area* bukan merupakan “*reinforcement by reward*” akan tetapi merupakan bentuk “*reinforcement by support*” dari Uni Eropa untuk keanggotaan di Eropa Timur (Borzal, 2016, pp. 77-95).

Reinforcement by support dapat juga digunakan untuk membantu negara-negara yang menginginkan keanggotaan Uni Eropa. Bagi Ukraina, prospek keanggotaan masih sebatas penyesuaian terhadap nilai-nilai yang dijunjung Uni Eropa di dalam *Copenhagen Criteria*. Walaupun belum terdapat unsur keanggotaan, akan tetapi peluang Ukraina untuk memperoleh keanggotaan masih terbuka lebar, jika menelaah tentang *Article 49 of the Treaty on the European Union* yang berbunyi

“*Any European State which respects the values referred to in Article 2 and is committed to promoting them may apply to become a member of the Union...*” (Treaty of Lisbon, n.d.)

Dari artikel tersebut, dapat ditafsirkan bahwa negara yang menjunjung nilai-nilai Uni Eropa dan berkomitmen penuh dalam mempromosikan nilai tersebut maka mereka berhak mengajukan permohonan keanggotaan (Treaty of Lisbon, n.d.). Hal yang sama juga di sampaikan di dalam *EU-Ukraine Parliamentary Association Committee Seventh Meeting* 18-19 April 2018 tentang

Final Statement and Recommendations Pursuant to Article 467(3) of the Association Agreement menghasilkan beberapa rekomendasi dari kerjasama tersebut, salah satunya tentang prospek keanggotaan, poin rekomendasi tersebut berbunyi

Stresses that the Association Agreement does not constitute the final goal in EU-Ukraine relations and welcomes the European aspirations of Ukraine; points out in this respect that Ukraine has a European perspective pursuant to Article 49 TEU, and may apply to become a member of the European Union provided it adheres to the Copenhagen criteria and the principles of democracy, respects fundamental freedoms and human and minority rights, and ensures the rule of law; considers that the EU should reconfirm Ukraine's European aspirations in the text of the final Declaration to be adopted at the 20th EU-Ukraine Summit in July 2018 (EU-Ukraine Parliamentary Association Committee, 2018, p. 4)

Untuk saat ini prospek keanggotaan sebagai salah satu bentuk *political spillover* dari *European Union-Ukraine Association Agreement* kemungkinan besar akan terjadi apabila reformasi yang dilakukan Ukraina di sektor ekonomi dan politik dalam *Association Agreement* berjalan maksimal. Uni Eropa akan menanggapi prospek keanggotaan melihat bagaimana negara tersebut menjalankan mempromosikan serta berkomitmen terhadap nilai-nilai Uni Eropa yang tertera di dalam *Copenhagen Criteria*. Dalam proses ini, Uni Eropa juga memberikan dorongan kepada Ukraina untuk benar-benar melakukan reformasi politiknya dengan baik. Dengan reformasi yang berjalan dengan baik, maka proses aksesinya menuju negara kandidat keanggotaan bisa didapatkan oleh Ukraina segera (NN, EU pushes reforms as Ukraine seeks membership promise, 2017).

Dalam penelitian ini, argumen mengenai *political spillover* dalam *Copenhagen Criteria* di bagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah adanya keterlibatan aktor atau organisasi supranasional dalam proses integrasi yang sifatnya lebih dominan dibandingkan dengan aktor negara. Poin kedua adalah aktor negara lebih memfokuskan perhatiannya (integrasi) ke tingkat supranasional.

Analisis *political spillover* dalam *Copenhagen Criteria* pada poin pertama adalah ketika Uni Eropa memiliki otoritas dalam menentukan apakah Ukraina sudah menjalankan nilai-nilai Uni Eropa dengan maksimal atau tidak. Dalam poin itu, organisasi supranasional memberikan penegasan terhadap tujuan jangka panjang integrasi, apabila integrasi tersebut akan berlanjut maka harus mengikuti kriteria yang organisasi tersebut inginkan ataupun sebaliknya. Penilaian tersebut menjadi fase penting karena Uni Eropa sudah secara langsung terlibat dalam internal perkembangan sebuah negara di sektor-sektor tertentu. Sedangkan aktor negara dalam hal ini hanya berfokus dalam meningkatkan integrasinya ke dalam lingkup supranasional. Dalam hal ini, Ukraina berfokus untuk menyesuaikan kriteria-kriteria yang ada di dalam *Copenhagen Criteria* melalui kerjasama *Association Agreement*.

Masalah keanggotaan Ukraina memang sempat memunculkan dinamika di dalam internal Uni Eropa sendiri. Dari segi dukungan untuk keanggotaan, saat ini Ukraina mendapatkan dukungan dari salah satu negara anggota Uni Eropa yaitu Polandia. Polandia mencoba mengaspirasikan keanggotaan Ukraina untuk prospek masa depan. Polandia menganggap bahwa Ukraina memiliki kemiripan dari segi budaya. Selain itu, letak geografis menjadi sektor penting, Ukraina dianggap oleh Polandia sebagai penyangga hubungan antara Polandia dengan Rusia. Polandia menginginkan Uni Eropa seperti NATO yang mengedepankan faktor geopolitik (Kuzio, Poland Lobbies Eu Membership For Ukraine, 2004).

Tabel 6. Klasifikasi Variabel *Spillover Effect* Terhadap Pembahasan

Variabel	Deskripsi
<p data-bbox="373 327 703 432">1. <i>Functional/Economic Spillover</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="804 327 1374 584">- <i>Functional/Economic Spillover</i> dari <i>Association Agreement</i> dan <i>Deep Comprehensive Free Trade Area</i> yaitu Ukraina menuju <i>Custom Union</i>. <li data-bbox="804 618 1374 1464">- Salah satu indikator bahwa <i>Custom Union</i> adalah <i>Functional/Economic Spillover</i> adalah tarif, di mana di dalam <i>Association Agreement</i> dan <i>Deep Comprehensive Free Trade Area</i> terjadi pengurangan tarif dan dari pengurangan tarif tersebut menimbulkan efek limpahan tersebut menuju integrasi lebih dalam yaitu tarif untuk <i>Custom Union</i>, di mana <i>Custom Union</i> mengharuskan Ukraina untuk menyesuaikan <i>Common External Tariff</i> <li data-bbox="804 1498 1374 1906">- Ukraina menuju <i>Custom Union</i> dibuktikan dari keinginan Presiden Petro Poroshenko serta menjadi pembahasan di dalam <i>EU-Ukraine Parliamentary Association Committee Seventh Meeting</i> 18-19 April 2018

	<p>tentang <i>Final Statement and Recommendations Pursuant to Article 467(3) of the Association Agreement</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa skenario tentang bagaimana Ukraina dalam menyesuaikan tarif di dalam <i>Custom Union</i>. Langkah pertama dengan penilaian Uni Eropa terhadap “<i>Ad Valorem</i>” dan “<i>Non ad Valorem</i>”. Langkah kedua dengan dengan membandingkan perbedaan rata-rata tarif masuk Uni Eropa Ukraina yang terikat dengan “<i>Ad Valorem</i>”, dengan metode mengurangi tingkat rata-rata barang yang sama, dan statistik menunjukkan Uni Eropa lebih tinggi tarifnya maka Ukraina wajib menaikan tarifnya melalui “<i>Tariff Binding</i>” di WTO.
<p>2. <i>Political Spillover</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Political Spillover</i> dari <i>Association Agreement</i> terdapat 2 argumen utama, yang pertama adalah keterlibatan Uni Eropa dalam perkembangan demokrasi Ukraina serta Ukraina menuju

	<p><i>Copenhagen Criteria.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator untuk <i>Political Spillover</i> poin pertama tentang keterlibatan Uni Eropa dalam perkembangan demokrasi di Ukraina adalah organisasi supranasional lebih dominan dalam proses integrasi sedangkan aktor negara lebih mengikuti alur kebijakan serta integrasi dari organisasi supranasional tersebut. Dari dua indikator tersebut indikator pertama tentang aktor organisasi supranasional lebih dominan terjadi ketika Uni Eropa pada awal kerjasama hanya mempromosikan demokrasi akan tetapi setelah adanya <i>Association Agreement</i> berubah menjadi dukungan reformasi serta implementasi kebijakan dan juga stabilisasi demokrasi untuk pemerintah Ukraina. Sedangkan Ukraina hanya berfokus mengikut arahan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap perkembangan demokrasinya.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Political Spillover</i> selanjutnya yaitu Ukraina menuju <i>Copenhagen Criteria</i>. Hal tersebut di bahas di dalam <i>EU-Ukraine Parliamentary Association Committee Seventh Meeting</i> 18-19 April 2018 tentang <i>Final Statement and Recommendations Pursuant to Article 467(3) of the Association Agreement</i>. - Indikator <i>political spillover</i> di dalam bagian ini sama dengan poin sebelumnya yaitu organisasi supranasional lebih dominan sedangkan aktor negara hanya akan mengikuti dan menjalankan proses integrasi lebih lanjut tersebut. Poin yang pertama organisasi supranasional lebih dominan dalam hal ini Uni Eropa memberikan penegasan terhadap Ukraina tentang prospek integrasi jangka panjangnya, jika ingin melanjutkan integrasinya maka harus menyesuaikan syarat-syarat yang ada di dalam <i>Copenhagen Criteria</i>, sedangkan poin kedua tentang aktor negara hanya mengikuti integrasi
--	--

	<p>lebih lanjut terjadi pada fase di mana Ukraina melakukan proses penyesuaian terhadap <i>Copenhagen Criteria</i> melalui kerjasam <i>Association Agreement</i>.</p>
--	---